

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Konstitusi Press.
- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Universitas Airlangga Press.
- Hadjon, P. M., dkk. (1993). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamid, T. (2020). *Pemerintahan Aceh dan otonomi khusus*. Rajawali Pers.
- Huda, N. (2009). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.
- Huda, N. (2013). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Huda, N. (2015). *Otonomi daerah, demokrasi lokal dan pemerintahan daerah*. UII Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Jalil, H. (2005). *Eksistensi otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945*. C.V. Utomo.
- Kaloh, J. (2007). *Mencari bentuk otonomi daerah (Suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global)*. Rineka Cipta.
- Manan, B. (1994). *Hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Pusat Studi Hukum FH UII.
- Marwan, M., & Jimmy, P. (2009). *Kamus hukum*. Reality Publisher.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Mandar Maju.

- Nurjanah, C. (2021). *Otonomi khusus Aceh dalam perspektif hukum tata negara*. Unsyiah Press.
- Ridwan HR. (2011). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Siswanto Sunarno. (2009). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sulaiman, T. M. (2019). *Kekhususan Aceh dalam bingkai NKRI*. Aceh Institute.
- Surayin. (2005). *Analisis kamus umum bahasa Indonesia*. Yrama Widya.
- Syafiie, I. K. (2009). *Ilmu pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Syafiie, I. K. (2011). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta.
- Syaukani, H. R., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Pustaka Pelajar.

B. Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

- A.R. Said. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, 2019.
- Agung Wibowo Putra. "Mekanisme Pemilihan Kepala Desa dan Implikasinya bagi Tata Kelola Desa." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 3, 2022.
- Almagfiroh. *Analisis Hukum Terhadap Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa*. Tesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- D.A. Rahman, dan M. Rizwan. "Memahami Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Aceh." *JPP Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Halimah, dan Halik. "Fungsi Keuchik dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie." *Jurnal Warta*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Heru Cahyono. "Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh." *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 2, 2012.
- Jefrie Maulana. "Politik Hukum Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh." *Ius Civile*, Vol. 4, No. 2, 2020.

M. Hidayat. "Disharmonisasi Hukum antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 2, 2022.

Mukhlis. "Keberadaan UUPA Sebagai *Lex Specialis*." *Jurnal Nanggroe*, Vol. 4, No. 3, 2015.

Nurjannah. "Kekhususan Aceh dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, 2021.

Rangga Wijaya. "Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945." *IJOLARES*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Sandya Athallah. *Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jember, 2024.

Titis Anindyajati, Winda Wijayanti, dan Intan Permata Putri. "Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* terhadap Keistimewaan Aceh." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3, 2021.

Zaki Ulya. "Refleksi *MoU Helsinki* dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

D. Website dan Kamus

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. (2026, Juni 6). *JDIHN*. [JDIHN](#)

JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2026, Juni 6). *Database peraturan BPK*. [JDIH BPK RI](#)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, Juni 6). *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. [Mahkamah Konstitusi RI](#)